

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi yang terjadi saat ini mendorong percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Perkembangan badan usaha baik swasta maupun milik negara terlihat bergerak begitu cepat. Dalam hal itu, setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai input penting dari kemajuan yang dialami. Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi faktor utama karena sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan (Tampi & Tinangon, 2015).

Instansi pemerintahan mempunyai skala usaha yang berfokus pada bidang pelayanan yang diberikan dalam bentuk tenaga, pikiran, ide-ide kreatif, pengalaman maupun keahliannya. Kemampuan dan keahlian seseorang yang dituangkan demi mencapai tujuan menjadi tolak ukur seseorang diberikan sebuah kompensasi yang disebut dengan gaji. Sebagai imbalan atas apa yang sudah dituangkan, pegawai yang bekerja didalam instansi pemerintahan berhak diberikan kompensasi berupa gaji pokok plus dengan tunjangan-tunjangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 43 mengatur tentang sistem penggajian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Indonesia. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang memiliki kewajiban sebagai klien untuk melayani publik dengan baik kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam membantu pelayanan publik dibutuhkan keefektifan dan efisiensi dalam pembagian kompensasi atau gaji.

Besaran gaji yang diperoleh pegawai tentunya berbeda sesuai dengan jabatan, lamanya bekerja, serta tingkatan pendidikannya. Jika gaji dibayarkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, maka akan meningkatkan semangat kerja para pegawai. Untuk menunjang kinerja dan kemajuan tersebut sebuah instansi memerlukan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) penggajian guna menunjang informasi. Merancang dan mengatur pembayaran serta perhitungan gaji kepada pegawai adalah salah satu kegiatan utama dari sistem penggajian. Sistem ini dilaksanakan di bawah campur tangan pemerintah, sehingga pegawai negeri sipil harus mengikuti peraturan pemerintah tentang sistem penggajian.

Kualitas sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien membutuhkan suatu ketelitian dalam penetapan, penggolongan, pencatatan, serta pembayaran gaji yang akan melibatkan beberapa dokumen seperti catatan akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi penggajian, maka akan memperkecil penyalahgunaan atau kesalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan yang dapat membuat perusahaan maupun instansi mengalami kerugian baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Aktivitas penggajian yang ada didalam suatu instansi pemerintah akan menyangkut status dan tingkat pemenuhan kebutuhan oleh banyak pegawai. Masalah yang timbul terkait dengan penggajian pegawai akan berpengaruh pada

kepuasan pegawai terhadap ketentuan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Sebab, masalah yang timbul bukan hanya menyangkut berapa banyak seorang pegawai digaji atas pekerjaannya, melainkan juga mempunyai hubungan yang sangat luas, baik dalam rangkai sistem kepegawaian yang berlaku, bobot pekerjaan yang diemban, maupun kaitan moral dan tanggung jawab sosial organisasi atas hidup pegawai dan keluarganya.

Tujuan instansi pemerintah memiliki sistem penggajian yang tepat karena gaji yang dibagikan harus sesuai dengan nominal yang diterima oleh pegawai. Apabila instansi pemerintahan maupun perusahaan telah memiliki sistem akuntansi penggajian yang baik, maka diharapkan perusahaan memiliki praktek yang sehat, seperti membandingkan kartu jam hadir dengan kartu jam kerja, pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji, dan lain-lain.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat adalah satu unit pelaksanaan yang bertugas untuk membantu dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam bidang keuangan dengan aspek pendapatan daerah meliputi perencanaan dan pengembangan, pendapatan serta pembinaan dan pengendalian yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sesuai Tupoksi yang telah ditetapkan, BPKAD berkewajiban untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Dalam

rangka melaksanakan kewajiban tersebut, maka BPKAD Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana strategis untuk dapat menentukan arah pengembangannya dalam meningkatkan kinerja SKPD khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya.

BPKAD berkewajiban menyusun Revisi Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Rencana strategis BPKAD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD, dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta potensi perkembangan pembangunan, yang penyusunannya bersifat indikatif dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 25).

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, BPKAD Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKAD, dimana semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai penunjang terlaksananya keefektifan dan ketaatan tugas yang akan dijalani, pegawai yang bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan harus mendapat timbal balik yang sebanding dengan porsinya. Oleh

karena itu BPKAD harus memiliki sistem akuntansi penggajian yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak melenceng dari standar prosedurnya.

Berdasarkan pada uraian yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai sistem akuntansi dan prosedur penggajian Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan mengangkat judul : **“Sistem Akuntansi dan Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat“**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan membahas terkait Sistem Akuntansi dan Prosedur Penggajian yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Dimana hal ini penulis akan membuat suatu perumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana sistem akuntansi dan prosedur penggajian Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dan prosedur penggajian Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimana gambaran flowchart yang digunakan dalam prosedur penggajian Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari penulisan tugas akhir berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Diploma III Universitas Andalas.
2. Memenuhi Kewajiban sebagai seorang Mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti mata kuliah wajib pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui lebih jelas terkait bagaimana sistem akuntansi dan prosedur penggajian Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana bentuk flowchart dalam proses penggajian BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya pembahasan yang dirangkai oleh penulis melalui tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bermanfaat untuk berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai wadah pembekalan bagi penulis untuk mempersiapkan diri menjadi seorang yang lebih berpotensi, kompeten dan profesional dalam melakukan pekerjaan sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
- b. Menambah pengetahuan, wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana Sistem Akuntansi dan Prosedur Penggajian suatu instansi berjalan dengan semestinya dan beroperasi dengan baik sesuai prosedurnya.
- c. Mendapat pengalaman kerja yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang baik dari kegiatan magang yang dilaksanakan sebagai penunjang dari penyusunan tugas akhir ini.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

- a. Menciptakan kerjasama yang baik antara instansi tempat magang yaitu BPKAD Provinsi Sumatera Barat dengan pihak Universitas.
- b. Ikut serta berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional.
- c. Membantu instansi dalam meningkatkan kemampuan manajemen lewat hasil laporan serta masukan yang dibuat penulis.
- d. Membantu meringankan pekerjaan pegawai yang bekerja di instansi tempat magang penulis yaitu BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

- a. Menambah pengetahuan literatur, bahan pembelajaran, informasi serta masukan dalam pengembangan masalah dan solusi yang berkaitan dengan masalah ini.
- b. Dapat menjadi sumber referensi bagi penulisan yang berkaitan dengan masalah ini.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan guna memenuhi mata kuliah wajib ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatra Barat yang beralamat di JL. Khatib Sulaiman No.43 A Padang, Sumatra Barat dengan waktu pelaksanaan magang yang berlangsung selama 40 hari kerja dan dimulai dari bulan Januari 2023.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Pengumpulan data dalam proses penulisan tugas akhir ini menggunakan pengumpulan data-data serta informasi-informasi dari instansi maupun narasumber terkait yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data dan informasi yang diperoleh adalah data yang tepat dan akurat. Metode yang digunakan antara lain adalah :

1. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Dalam metode ini penulis akan melakukan pengamatan serta mengumpulkan data dengan terjun secara langsung ke lapangan untuk mencari tau hal yang terkait dengan sistem dan prosedur penggajian pada

BPKAD Provinsi Sumatra Barat guna mendapat informasi dan gambaran secara langsung yang lebih detail dan nyata.

2. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang digunakan instansi terkait dengan proses penggajian pada BPKAD Provinsi Sumatra Barat.

3. Metode Wawancara (*Interview*)

Pada metode ini, penulis melakukan pengumpulan data dan memperoleh sebuah data dengan melakukan suatu Tanya jawab secara langsung kepada narasumber bagian keuangan yang menangani penggajian pegawai pada BPKAD Provinsi Sumatra Barat.

4. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literature serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi dan Prosedur Penggajian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat untuk memudahkan pembuatan laporan magang ini disajikan dalam lima bab. Adapun uraian dari masing-masing bab tersebut terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Tempat dan Waktu Magang, Metode pengumpulan data yang digunakan serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan magang tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Provinsi Sumatra Barat bersumber dari Artikel, Jurnal, kumpulan buku-buku serta dokumen pendukung lain yang diakses melalui internet.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah instansi, visi dan misi, uraian tugas dan struktur organisasi pada BPKAD Provinsi Sumatra Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai penjelasan yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis dengan uraian berdasarkan hasil yang diperoleh pada saat melaksanakan magang mengenai Sistem Akuntansi dan Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan di BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

